ISSN Elektronik: 2442-2282
Volume: IV, Nomor II. Desember 2018

PENGARUH UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Zakiyah dan Agus Purnomo

Dosen Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari
Kikiayoenani@yahoo.com | guspur80@gmail.com

Abstrak

The condition of Indonesia's economic development has been sustained by foreign loans, whose numbers have continued to increase from year to year. Various forms of programs and projects carried out by the Indonesian government to improve the welfare of the people also use sources of foreign loans. The inclusion of foreign or foreign debt loans makes the government obtain additional budget in carrying out economic development program activities in Indonesia, especially development programs in the form of education, health and economy. Foreign debt from 1997 to 2016 has increased due to the Indonesian state revenue budget not yet fulfilling the state budget from year to year which has resulted in the state making a proposal for foreign loans to meet the needs of increasing the economy of the community to achieve the country's welfare. This study uses a quantitative descriptive research approach. in order to find out the effect of foreign debt on the development of the Indonesian economy in a sharia economic perspective.

Kata Kunci : Utang Luar Negeri; Kesejahteraan; Pembangunan ekonomi

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki daratan, lautan dan berbagia pulau yang tersebar dari ujung sabang sampai merauke. Akibat berkembangnya pertumbuhan perekonomian negara Indonesia membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarkat Indonesia dari segi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tresier, insfratruktur, dan lain-lainya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapital, dengan menghitungkan pertambahan jumlah penduduk dengan disertai perubahan struktur perekonomian negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Semenjak krisis ekonomi tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat utang luar negeri yang diberikan IMF dan Bank Dunia untuk pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dana Moneter Internasional (IMF) yang diberikan kepada Negara Indonesia untuk pembangunan perekonomian Indonesia, oleh karena itu bantuan yang diberikan oleh IMF bukanlah secara Cuma-Cuma, atau tanpa syarat.[1]

Sebagai lembaga keuangan dunia yang profesional, mereka dalam memberikan utang kepada negara lain memiliki beberapa syarat yang ketat atas bantuan yang diberikan kepada anggota negara yang membutuhkan dana bantuan untuk mengatasi perekonomian negara tersebut. [2] Hal inilah ada yang menyebabkan pro dan kontra akibat dari peminjaman utang luar negeri dari peminjaman dana dari IMF tersebut. Hal ini dianggap akan membuka jalan intervensi lembaga internasional untuk menguasai perekonomian negara indonesia akibat utang yang diajukan oleh pemerintah kepada IMF, adanya pengajuan Utang Luar negeri disini dengan tujuan penambahan biaya pembangunan saranan dan prasarana yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam anggaran APBN dan tujuan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian.

[1] Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia (Masalah dan Kebijakan Kontemporer), (Yogyakarta : UII Pres,

[2] Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia, (Yogyakarta : UII Pres, 2004), hlm.195

Pada tahun 1997 Negara Indonesia mengalami Krisis Moneter akibat melemahnya perekonomian Indonesia, sehingga mengakibatkan turunya nilai tukar mata uang rupiah yang sangat signifikan. Turunnya nilai tukar mata uang rupiah ini telah berdampak luas pada berbagai variabel ekonomi lainnya, di samping juga menimbulkan krisis dibidang politik, yang berakibat pergantian kepala pemerintahan negara Indonesia pada tahun 2001 tersebut. Akibat pinjaman utang negara indonesia terhadap IMF belum teratasi yang berdampak kepada perekonomian pada waktu 2001 masih belum berakhir, sehingga nilai tukar rupiah masih rendah terhadap nilai tukar Dollar Amerika.[3] Pada saat tahun 2000-2004 terdapat penurunan secara konsisten persentase jumlah utang luar negeri terhadap PDB, dari semula 51,7% (Pada Tahun 2000) menjadi 32,57% (Pada tahun 2004). Pada tahun 2005 persentase utang luar negeri tersebut meningkat kembali menjadi 38,55%. Pada tahun anggaran 2006 utang luar negeri yang harus dibayar sebesar 11,8% dari APBN atau setara dengan Rp 76,6 triliun.[4]

Kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama ini ditopang dengan adanya pinjaman luar negeri yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun. Berbagai bentuk program dan proyek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun menggunakan sumber pinjaman luar negeri. Adanya pemasukan pinjaman dari luar negeri atau utang luar negeri ini, menjadikan pemerintah mendapatkan tambahan anggaran belanja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya program-program pembangunan berupa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.[5] Berdasarkan utang luar negeri dari tahun 1997 sampai 2016 mengalami kenaikan akibat anggaran pendapatan negara Indonesia belum mencukupi anggaran belanja negara dari tahun ketahun yang mengakibatkan negara melakukan pengajuan pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteran negara.

[3] Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia, (Yogyakarta : UII Pres 2004), hlm.196

[4] Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik (Kajian Teoretis dan Analisis Empiris), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2014), hlm.138

[5] Suparmoko. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm.44

Berdasarkan data utang luar negeri menurut data Bank Indonesia, perkembangan utang luar negeri negara Indonesia terus meningkat dari tahun 1997 utang luar negeri pemerintah sebesar USD 53.865 miliar, kemudian tahun 2001 turun 1,10% menjadi USD 69.404 miliar pada tahun 2002, pemerintah menambah ULN sehingga mengalami peningkatan sebesar USD 74.723 miliar. Tetapi pada tahun 2006, ULN menurun hingga USD 75.816 miliar. Selanjutnya ULNP terus mengalami gejolak peningkatan hingga pada tahun 2015 sampai berjumlah 310.722 miliar. Melihat dari perkembangan utang luar negeri (ULN) dipengaruhi karena peningkatan pembangunan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Seperti yang dilihat dari data tabel di bawah ini:

Tabel 1 Utang Luar Negeri dari Tahun 1997 sampai 2015 (Dalam jumlah Miliar)

Tahun	Jumlah Utang Luar Negeri (dalam Miliar)
1997	53.865
1998	67.315
1999	75.721
2000	74.891
2001	69.404
2002	74.723
2003	81.727
2004	82.797
2005	80.184
2006	75.816
2007	80.615
2008	85.136
2009	85.136
2010	90.853
2011	106.86
2012	112.427
2013	252.364
2014	252.364
2015	310.722
2016	745.821

Sumber Data : Bank Indonesia 2016

Berdasarkan data diatas bahwa utang luar negeri mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 1997 sampai 2016 sebesar USD 745.821 Miliar. Pengaruh naiknya pinjaman utang luar negeri akibat dari tujuan pemerintah untuk memperbaikin pertumbuhan perekonomian negara Indonesia dari segi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Menurut data Bank Indonesia 2016 utang luar negeri Indonesia sebesar USD 745.821 setara dengan sebesar Rp 10.143 Triliun dengan nilai tukar rupiah 1 USD sebesar Rp 13.600. adanya peningkatan utang luar negeri di negara Indonesia ini dengan tujuan untuk penambahan pembiayaan pembangunan perekonomian negara Indonesia dalam bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesehatan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil Judul pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian nasional dalam prespektif ekonomi syariah.

A. Rumusan Masalah

Dari judul dan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perencanaan dan pembayaran utang luar negeri Indonesia periode 2015-2018?
2. Bagaimanakah Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Nasional dalam Ekonomi Syariah?

B. Tinjauan Pustaka

Dalam bahasa Arab, Utang (al-Dayn) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, dayn termasuk kepada al milk. Utang dapat dikatagorikan pada al-Māl al-Hukmi: "sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang." Sehingga utang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al Dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan al-Qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, dayn lebih umum dari al-qardh. Menurut Abu Al-Kasim kata dayn berarti memberi utang atau berhutang. dan kata qardh memiliki

arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya.

Secara terminologi utang ialah sejumlah uang yang diberikan/dipinjamkan kepada orang membutuhkan untuk keperluan kebutuhan dia dengan kesepakatan untuk mengembalikan uang tersebut kepada peminjam dengan ketentuan dan kesepakatan tanpa adanya penambahan keuntungan. Adapun utang piutang (Al Qardl) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama. Pengertian sesuatu yang telah di jelaskan dalam surat Al Maaidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) pada akhir Triwulan III Tahun 2016 (posisi 30 September 2016) adalah sebesar ekuivalen USD 16.794,6 juta, yang terdiri dari 163 proyek dan dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami kenaikan sebesar USD 1.438,7 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan karena adanya beberapa proyek yang baru efektif, sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani

namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (on going) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Realisasi penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan III Tahun 2016 adalah sebesar USD 8.461,3 juta atau mencapai 50,4 persen dari total nilai pinjaman yang sedang berjalan. Sedangkan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan III adalah USD 1.353,1 juta atau mencapai 46,6 persen dari target TA 2016 sebesar USD 2.902,1 juta. Persentase penyerapan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penyerapan lima tahun terakhir, yaitu 43,4 persen. Kemajuan kinerja penyerapan proyek selama satu triwulan ini berjalan dengan cukup baik, yang diindikasikan dengan adanya beberapa proyek yang mampu menyerap anggaran lebih dari 52,5 persen.

Pinjaman luar negeri sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sekitar 58,0 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, yaitu berupa pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. guna untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri terhadap pembangunan perekonomian negara Indonesia dalam prespektif ekonomi syariah. Maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis-jenis penelitian deskriftif kuantitatif. Dalam penelitian ini menyelesaikan apa pengaruh utang luar negeri dalam pembangunan perekonomian negara Indonesia dan hasil penelitian sedapat mungkin melibatkan

pihak yang diteliti Menurut M. Nadzir (1999). Penelitian ini akan dilakukan di Badan Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dilapangan, hasil data laporan Hutang Indonesia pada periode 2015-2019 dan laporan perencanaan pembangunan sarana dan prasaran, Pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terkait dengan perencanan hutang luar negeri. Di samping itu data sekunder juga diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa buku panduan, literature kepustakaan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pembiayaan Hutang luar negeri terhadap pembangunan perekonomi Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, oleh karena itu data yang diperoleh Data primer diambil langsung dari lapangan melalui data laporan hutang Negara terhadap perencanaan dan pembiayaan pertumbuhan perekonomi Indonesia, dan mengamati langsung, juga melakukan penelusuran tentang Hutang Negara dari waktu ke waktu. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan lain-lain.

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data tersebut di peroleh yaitu:

1. Analisis data hutang luar negeri pada periode 2015-2019, yang pertama kali di lakukan menguji data hutang luar negeri terhadap pertumbuhan perekonomi Indonesia, yang kedua dilakukan analisis pada perencanaan dan pembiyaan pembangunan saran dan prasarana, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan mikro dan makro ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah.
2. Observasi lapangan, yaitu dilakukan dengan mengamati terhadap objek penelitian dalam pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian nasional dalam prespektif ekonomi syariah.

3. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari beberapa bahan bacaan maupun bahan karya ilmiah, jurnak, dokumen dan laporan dari peraturan pemerintah dan kebijakan Hutang Luar Negeri.

D. Hasil dan Pembahasan

Perencanaan dan pembayaran utang luar negeri Indonesia periode 2015-2018

Perencanaan pembangunan (Development) mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau dewasa. Secara konsep pembangunan islam adalah pembangunan ekonomi yang memang sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, namun walupun telah dibedakan artinya pada akhirnya kedua tersebut. Menurut Sukirno menyatakan bahwa literatur pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 1.761 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju (high income). Pada saat yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah dan negara berpengasilan tinggi juga bergerak karena perekonomian global juga tumbuh. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global.

Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen pertahun. Inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta tetap menjaga kestabilan ekonomi. Adapun pendapatan negara yang didapatkan oleh negara Indonesia:

Tabel. 4.1 Pendapatan Negara 2014-2018

Rincian	APBN-P	APBN-P	APBN-P	APBN-P	APBN-P
	2014	2015	2016	2017	2018
	Milyar Rp	Milyar Rp	Milyar Rp	Milyar Rp	Milyar Rp
Pendapatan Negara dan Hibah	233.277	242.706	275.571	323.493	331.558
Penerimaan Dalam Negeri	121.450	127.497	133.179	149.307	151.651
Penerima Perpajakan Daerah	103.087	107.892	112.689	125.806	128.475
Retribusi Daerah	1.705	1.689	1.875	1.730	1.905
Perusahaan Milik Daerah & Peng Kekayaan daerah	2.972	3.223	3.158	3.460	4.010
Penerimaan Pendapatan Lain-lain	42.943	53.620	28.658	24.888	23.298
Penerimaan Expor	28.435	34.889	22.279	26.118	16.621

Sumber Data : Bank Pusat Statistik Provinsi Kalsel 2019

Dilihat dari data Bank Indonesia tahun 2014 dan 2015 pendapatan negara mengalami kenaikan dari penerimaan pendapatan Daerah 2014 sebesar Rp 233.277 Milyar dan pada tahun 2015 penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp 242.706 jadi pendapatan daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan mencapai 104 %. Pada Tahun 2016 pendapatan daerah yang diterima mengalami kenaikan sebesar Rp 275.571 dari hasil pendapatan yang didapatkan oleh Daerah terus mengalami kenaikan karena adanya pertumbuhan perekonomian yang dipengaruhi oleh pembangunan dibidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesehatan.

Adanya peranan pemeritah Daerah dalam merencanakan pembangunan perekonomian Indonesia dengan melalui beberapa kebijakan perekonomian yang direncanakan oleh pemerintah. Adapun ada beberapa Kebijakan Perokonomian dalam pembangunan perekonomian:

1. Peranan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Rakyat kecil dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat ekonomi Kecil dengan melalui kredit Properti dan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor perdagangan, konstruksi, dan Industri Manufaktur.

2. Adanya Perananan Bank Indonesia dan kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama untuk mengembangkan UMKM dan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan akses, jangkauan layanan keuangan dan menyediakan fasilitas pemberdayaan.
3. Program kemandirian ekonomi pesantren melalui peningkatan wawasan mengenai ekonomi syariah, program kewirausahaan yang diwujudkan melalui pendirian inkubator bisnis syariah, dan program pionir wirausaha pesantren yang dilakukan antara lain melalui pendampingan usaha, fasilitasi akses pemasaran, dan fasilitasi akses keuangan. Program pemberdayaan ekonomi tersebut pada prinsipnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren
4. Perencanaan Pemerintah dalam melaksanakan program kewirausahaan dengan kerjasama dengan Bank Indonesia bagi warga binaan pemasyarakatan serta peningkatan kapasitas dan perubahan mindset bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian bantuan teknis kepada petugas pemasyarakatan, pelatihan dan/atau pendampingan usaha kepada warga binaan pemasyarakatan dengan mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura penyumbang inflasi atau komoditas lain yang dapat menunjang perekonomian daerah.
5. Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian juga bekerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor pertanian.
6. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan insentif pembangunan kilang minyak baru serta penghapusan bea masuk impor suku cadang pesawat.
7. Bank Indonesia mendukung pemerintah untuk menjadikan proyek pembiayaan infrastruktur di negara emerging sebagai fokus utama pembahasan fora kerja sama internasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terlibat aktif dalam pembentukan Islamic Investment Infrastructure Bank atau World Islamic Investment Bank (WIIB) untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur negara anggota IDB.

8. Bank Indonesia juga terlibat aktif dan mendukung pemerintah dalam pembentukan Global Infrastructure Hub (GIH) di fora G20, yang diharapkan dapat beroperasi secepatnya sebagai pusat informasi dalam investasi infrastruktur.
9. Pembangunan saranan dan prasanan gedung sekolah, universitas/sekolah tinggi, belanja buku, dan belanja pegawai
10. Pembangunan Bandara, jalan, jembatan, dan lain-lainnya.

Dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya peranan penting dari pemerintah pusat dan daerah dalam membangun perekonomi mulai dari desa, sehingga peranan kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan dana APBD yang di dapatkan dari pemerintahan pusat. Adapun anggara belanja pemerintah daerah di dapatkan dari pembiayaan hutang luar negeri seperti:

Tabel. 4.1 Pendapatan Negara 2014-2018

Rincian	APBN-P	APBN-P	APBN-P	APBN-P	APBN-P
	2014	2015	2016	2017	2018
	Milyar Rp	Milyar Rp	Milyar Rp	Milyar Rp	Milyar Rp
Belanja Tidak Langsung	123.757	143.155	202.072	186.536	202.072
Belanja Pegawai	30.925	38.807	81.085	72.476	81.085
Belanja buku, pembangunan, ruang (Sekolah, Universitas, dan lain-lain)	45	61	140	69	140
Belanja Subsidi (Kesehatan dan BBM)	31.757	694.262	4.358	1.488	4.358
Belanja Hibah, Beasiswa Pendidikan	33.018	39.957	53.521	46.837	53.521
Belanja Bantuan Sosial	1.640	3.029	5.267	4.129	5.267
Pembayaran Hutang Luar Negeri	31.842	32.794	38.968	40.014	38.968
Belanja Langsung	95.577	103.885	147.883	120.503	147.883
Pembiayaan Daerah	42.378	30.554	8.224	42.572	8.224
Jumlah Pengeluaran APBN	261.712	277.595	358.180	349.611	358.180

Sumber Data : Bank Pusat Statistik Provinsi Kalsel 2019

Hasil data table di atas menujukan adanya peningkatan belanja yang di lakukan oleh setiap pemerintahan daerah dari mulai belanja secara tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan daerah dalam bentuk pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu melihat kebutuhan apa saja yang di butuhkan seperti contoh belanja karyawan guru honorer, guru Pns, Dosen PNS atau dosen kontrak, dan karyawan kontrak/honorer bisanya pihak kabupaten mengajukan tenaga honor/kontrak yang diajukan kepada pemerintah provinsi dengan tujuan posisi yang kosong dapat di isi oleh para tenaga kontrak/honor.

Dari data table di atas adanya kenaikan anggaran yang dilakukan pada sector belanja pegawai dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebesar 113,2 % dalam proses belanja pegawai. Seperti dana belanja kesehatan yang di rencanakan pemerintah daerah setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang mengakibatkan APBD tiap tahun yang dirancang mengalami kenaikan terus yang mengakibatkan APBN harus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi dari hasil kesimpulan data di atas menjelaskan adanya peranan Hutang Luar Negeri yang di terapkan dari tahun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja kebutuhan pembangunan perekonomian daerah.

Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Daerah

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain/orang lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. (Nasrun Haroen, 2000) Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan *sesuatu* kepada orang lain dengan perjanjian orang tersebut akan membayar yang sama dengan apa yang dia pinjam dari orang lain. (Basri, 2003) Utang piutang merupakan salah satu mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.

Bahkan al-Qur'an menyebut utang piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "mengutangkan kepada Allah dengan utang baik." (Ghufron, 2002: 171) Disyaratkan untuk sahnya pemberian utang ini bahwa pemberi utang adalah orang yang boleh mengeluarkan sedekah. Maka, seorang wali (pengasuh) anak yatim tidak boleh memberikan utang dari harta anak yatim yang ia asuh tersebut. Disyaratkan juga diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang di tangan orang yang meminjam, dan ia wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nundanya.

Adanya pengajuan hutang negara Indonesia untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi daerah sebagai wacanan pertumbuhan ekonomi daerah dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan. Tahun 1997 negara Indonesia sudah memiliki Hutang Luar Negeri dari tahun ke tahun Hutang Negara Indonesia semakin bertambah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat akibat adanya pembangunan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan kesejahteran. Adapun data hutang luar negeri dari tahun 2015 sampai 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hutang Luar Negeri Dari tahun 2015-2018 (USD Milyar)

NO	TAHUN	Jumlah ULN
1	2014	293.328
2	2015	310.730
3	2016	317.086
4	2017	352.25
5	2018	380,5
6	2019	393,83

Sumber Data Kemenkeu.go.id

Dari table di atas hutang luar negeri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami 7,2 % dari pada akhir Januari 2019 menembus Rp 5.400 triliun seiring tumbuhnya utang luar negeri pemerintah dan swasta. Berdasarkan data Bank Indonesia utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 383,32 miliar setara Rp 5.443,19 triliun dengan kurs Rp 14.200/dolar

Amerika Serikat. Angka tersebut naik US$ 5,45 miliar (1,45%) dibanding bulan sebelumnya dan juga meningkat US$ 25,71 miliar (7,2%) dari Januari 2018.

Adapun utang pemerintah pada Januari 2019 meningkat 3,74% menjadi US$ 190,25 miliar (Rp 2.701,54 triliun) dari bulan yang sama tahun sebelumnya dan Sementara utang swasta meningkat 10,82% menjadi US$ 193,07 miliar (Rp 2.741,64 triliun). Akibat dari bertambah jumlah Hutang Luar negeri melemahnya Nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dollar, sehingga akan terjadinya inflasi proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Pada tahun 2013 Inflasi mengalami kenaikan dilihat pada bulan Desember menunjukan nilai Inflasi 8,38% sampai pada periode Tahun 2014 Bulan Desember menunjukan nilai Inflasi 8,36% ini diakibatkan karena harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang mengakibatkan harga BBM naik, naik harga tarif listrik, naik harga transportasi, harga bahan pokok mengalami kenaikan, turunnya harga batubara disektor dunia, turunya harga minyat sawit, turunya harga karet dan naikya harga cabai naik yang mengalami nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang mengakibatkan nilai dollar amerika mengalami kenaikan pada perekonomi tersebut. Pada tahun 2015 tingkat Inflasi pada bulan januari sebesar 6,96% sampai bulan agustus inflasi sebesar 7,18% dikarena lambatnya perkembangan perekonomian dunia yang mengakibatkan banyak negara kecil dan negara besar kena dari dampak inflasi. Pada tahun 2016 bulan januari tingkat inflasi sebesar 4,14% sampai bulan desember sebesar 3,35% ini dikarenakan adanya kebijakan politik yang sedang dilakukan negara amerika serikat dalam pemilihan presiden yang mengakibatkan perekonomian amerika mengalami kemunduran dan perekonomian indonesia mengalami baik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di tulis diatas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal :

1. Dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat

yang dlaksanakan dalam bentuk ekonomi seperti pemberian kredit KUR bagi pelaku Usaha UMKM, Pembangunan sarana dan prasarana (Jembatan, gedung sekolah, jalan, rumah sakit, dan Taman), Pengadaan karyawan, belanja bantuan sosial (Bencana Alam, dan Kesehatan), Belanja Hibah (Buku, dan Beasiswa)

2. Akibat dari bertambah jumlah Hutang Luar negeri melemahnya Nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dollar, sehingga akan terjadinya inflasi proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Pada tahun 2013 Inflasi mengalami kenaikan dilihat pada bulan Desember menunjukan nilai Inflasi 8,38% sampai pada periode Tahun 2014 Bulan Desember menunjukan nilai Inflasi 8,36% ini diakibatkan karena harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang mengakibatkan harga BBM naik, naik harga tarif listrik, naik harga transportasi, harga bahan pokok mengalami kenaikan, turunnya harga batubara disektor dunia, turunya harga minyat sawit, turunya harga karet dan naikya harga cabai naik yang mengalami nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang mengakibatkan nilai dollar amerika mengalami kenaikan pada perekonomi tersebut. Pada tahun 2015 tingkat Inflasi pada bulan januari sebesar 6,96% sampai bulan agustus inflasi sebesar 7,18% dikarena lambatnya perkembangan perekonomian dunia yang mengakibatkan banyak negara kecil dan negara besar kena dari dampak inflasi.

Daftar Pustaka

Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia (Masalah dan Kebijakan Kontemporer), (Yogyakarta : UII Pres, 2000).

Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia, (Yogyakarta : UII Pres, 2004).

Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia, (Yogyakarta : UII Pres 2004).

Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik (Kajian Teoretis dan Analisis Empiris), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2014).

Suparmoko. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997).

Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999).

Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoritis dan Sejarah), (Jakarta: Kencana Press, 2012).

Abu al-Kasim bin Muhammad Al-Husain, . *al-Mufradad fi Gharibil quran*, t.tp:

Nazar Mustafa al-Baz, tt.

Nurul Huda, dkk. Keuangan Pubilk Islam (Pendekatan Teoritis dan Sejarah) Al-Qur'an dan Terjemah, Waqaf & Ibtida Qur'an Suara Agung, (Jakarta : Suara Agung, 2015)

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri, (Kementerian PPN/Bappenas 2017).

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri.

Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan), (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006).

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.